

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan

Recognizing the showing off ways to acquire this ebook **Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan** is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan associate that we provide here and check out the link.

You could buy guide Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan or acquire it as soon as feasible. You could speedily download this Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan after getting deal. So, considering you require the ebook swiftly, you can straight acquire it. Its fittingly categorically easy and correspondingly fats, isnt it? You have to favor to in this spread

[Directory of ASEAN Legal Scholars - 1986](#)

Formation and Third Party Beneficiaries - Mindy Chen-Wishart 2018
Table of legislation: pages xxvii-xxxvii.

Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. 2021-11-16

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita-cita luhur pembentukannya. Walaupun, selain peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum masyarakat, moralitas pembentuk, moralitas pelaksana, dan moralitas penegak hukum sangat berpengaruh bagi efektifitas bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Untuk itu, berbagai potensi persoalan peraturan perundang-undangan baik law making process problem, interpretation problem, implementation problem, maupun capacity problem harus menjadi perhatian bagi para pembentuk agar peraturan perundang-undangan dapat berdayaguna dan berhasil guna sehingga tujuan pembentukannya terwujud sebaik-baiknya. Buku ini membahas mengenai berbagai hal di atas, baik dalam konsep, teori,

maupun aplikasinya. Bahasan mengenai asas, jenis dan hierarki, materi muatan, fungsi, teknik penyusunan, teknik analisis naskah akademik, kewenangan, proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ragam bahasa peraturan perundang-undangan menjadi materi pokok yang ditulis secara konseptual dan aplikatif dalam buku ini. Selain itu, bahasan mengenai persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan pun menjadi hal yang dibahas dalam buku ini berbasis praktik. Buku ini sangat cocok untuk para mahasiswa, pegawai pemerintahan, anggota legislatif, konsultan dan tenaga ahli pemerintah, serta masyarakat umum yang memiliki minat mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan secara konseptual dan komprehensif. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi banyak pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta memudahkan dalam praktik pembentukan peraturan perundangundangan.

Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan - Ani Purwanti 2020-12-07

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1 **AQIDAH DAN SYARIAH ISLAM (Sebuah Bunga Rampai)** - M. Adiguna Bimasakti

AQIDAH DAN SYARIAH ISLAM (Sebuah Bunga Rampai) PENULIS: M. Adiguna Bimasakti Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7328-47-6 Terbit : November 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam Islam, agama (diin) bukan hanya soal kepercayaan individual semata, melainkan keseluruhan konsep yang utuh dari segala aspek hidup manusia. Dalam Al-Quran terkadang agama juga disebut sebagai millah, kata yang diambil dari Bahasa Aram (Nenek Moyang Bahasa Suryani) yang berarti "tenda" (Millata Ibraahiima - Millah Ibrahim / Tenda Ibrahim / Agama Ibrahim) dan kemudian diserap kedalam Bahasa Ibrani berubah makna menjadi "kalimat" atau "kata-kata", kemudian dalam Terminologi Bahasa Arab menjadi setara dengan kata "diin" yang berarti juga "agama". Artinya agama mestilah menaungi manusia dan melindunginya, serta sesuai dengan hadits: "Agama adalah Nasihat" (Shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, hadits no. 55 dan no. 95). Berangkat dari sana, maka keseluruhan aspek hidup manusia harus dapat dijawab oleh agama, dari mulai permasalahan Aqidah (keyakinan), akhlak (perilaku), dan syariah (tuntunan hukum). Seiring berkembangnya waktu, bertambah kompleks pula permasalahan yang ditemui umat Islam dalam menjalankan agamanya di tengah masyarakat modern. Untuk itulah tulisan-tulisan dalam buku ini mencoba untuk mengulas permasalahan-permasalahan tersebut, utamanya yang terkait dengan Aqidah dan syariah dalam Islam. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Direct Jurisdiction - Anselmo Reyes 2021-08-26

The second thematic volume in the series Studies in Private International Law - Asia looks into direct jurisdiction, that is, the situations in which the courts of 15 key Asian states (Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, and India) are prepared to hear a case involving cross-border elements. For instance, where parties are habitually resident abroad and a dispute has only some, little or no connection with an Asian state, will the courts of that state accept jurisdiction and hear the case and (if so) on what conditions? More

specifically, the book's chapters explore the circumstances in which different Asian states assume or decline jurisdiction not just in commercial matters, but also in other types of action (such as family, consumer and employment disputes). The Introduction defines terminology and identifies similarities in the approaches to direct jurisdiction taken by the 15 Asian states in civil and commercial litigation. Taking its cue from this, the Conclusion assesses whether there should be a multilateral convention or soft law instrument articulating principles of direct jurisdiction for Asia. The Conclusion also discusses possible trajectories that Asian states may be taking in respect of direct jurisdiction in light of the COVID-19 pandemic and the political tensions currently besetting the world. The book suggests that enacting suitable rules of direct jurisdiction requires an Asian state to strike a delicate balance between affording certainty and protecting its nationals. At heart, direct jurisdiction involves sometimes difficult policy considerations and is not just about drawing up lists of jurisdictional grounds and exceptions to them.

Kapita Selektta Pemasaryakatan Edisi III "Back to Basic" - Abdul Rasyid Hendaro

Pemasaryakatan seolah tidak pernah luput menjadi tajuk utama pemberitaan, mayoritas pemberitaan negatif. Kekerasan yang dilakukan oknum, peredaran gelap narkoba, fasilitas mewah bagi narapidana korupsi, adalah tema-tema pemberitaan yang repetitif di media selama bertahun-tahun. Lantas apakah Pemasaryakatan memang tidak pernah berubah? Gencarnya pemberitaan media menciptakan frame negatif, bagi institusi pemasaryakatan di tengah masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem penegakan hukum, merupakan salah satu bidang yang menuai ketidakpuasan dari masyarakat. Tentu Pemasaryakatan sebagai akhir daripada sistem, turut menjadi sumber kekecewaan itu sendiri. Berbagai pembenahan melalui program dan inovasi telah dilakukan, demi terciptanya pembaharuan di dalam institusi pemasaryakatan. Re-framing melalui fungsi kehumasan juga sudah dilakukan secara maksimal, baik melalui media internal maupun eksternal. Namun kita bisa melihat, upaya ini belum kunjung berhasil

meredam sentimen negatif dari masyarakat. Lima puluh delapan tahun sejak Pemasyarakatan lahir, sebagai paradigma baru dalam memberikan penghukuman. Akankah ke depannya lebih banyak meninggalkan catatan-catatan miring media massa, dan upaya pengalihan isu melalui pemberitaan kehumasan di media internal? Sebagai insan muda yang menginginkan perubahan, kami berharap dapat meninggalkan catatan-catatan obyektif tentang pemasyarakatan. Catatan yang tidak berpihak, jujur, lugas, dan tidak dilandasi oleh kepentingan lain di luar literasi. Inilah yang menjadi semangat kami untuk terus konsisten menerbitkan Kapita Selekta Pemasyarakatan, sebagai cara tahunan kami merayakan Hari Bakti Pemasyarakatan. Pada jilid ketiga ini, kami memilih tiga tema besar yang kami nilai relevan untuk diulas pada momen ini. Pembentukan Lapas industri, kebijakan asimilasi di rumah selama pandemi, dan persoalan pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Menjadi isu besar yang kami bahas melalui opini singkat, yang lahir dari buah pemikiran kami pribadi. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan-tulisan kami tidak sempurna. Namun kami percaya bahwa sesuatu yang dilakukan dengan tulus dan konsisten, suatu saat akan melahirkan kebermanfaatan yang tidak terduga. Pada akhirnya coretan kami saat ini akan menjadi catatan kecil sejarah di masa mendatang, yang semoga saja dapat menunjukkan potret riil Pemasyarakatan. Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58!

Prospek Penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) - Dr. Marko Cahya Sutanto, S.H., LL.M. 2021-03-24

Buku ini berfokus dalam hukum kontrak, khususnya hukum kontrak jual-beli barang internasional, serta mengkaji kelayakan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (UNCITRAL - 1980) untuk digunakan dalam pengembangan hukum jual-beli barang di Indonesia. Asal mula disusunnya naskah disertasi ini adalah buah pemikiran tentang kesiapan sistem hukum Indonesia yang seharusnya hadir untuk mengatur transaksi/kontrak perdagangan barang antar pelaku usaha yang melintasi perbatasan negara guna menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) sekaligus mengantisipasi kondisi

perdagangan dewasa ini. Berangkat dari pemikiran di atas, secara teoretis dan melalui pendekatan yuridis normatif penulis mengembangkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai harmonisasi hukum. Ada dua pola harmonisasi hukum, yaitu harmonisasi hukum regional dan harmonisasi hukum internal. Harmonisasi hukum regional merujuk kepada proses menuju penyeragaman, atau penyelarasan hukum substantif yang memiliki cakupan keberlakuan pada tingkat regional, sedangkan harmonisasi hukum internal merupakan upaya penyelarasan di dalam sistem hukum positif Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam CISG, dengan tujuan untuk membentuk sebuah instrumen hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan perdagangan barang internasional dan diterima oleh masyarakat internasional.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam tugas kedinasan - Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. 2022-02-14

Diulas secara ringkas dan menarik dalam buku ini tentang Praktik pelaksanaan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tujuan mencegah dan memberantas Korupsi dalam Tugas Kedinasan. Pembahasannya dilakukan dalam duabelas Bab: BAB I: Pengertian Korupsi; BAB II: Eksistensi komisi pemberantasan korupsi di indonesia; BAB III: Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong (ICAC) dalam Melakukan Pencegahan Korupsi; BAB IV: Kewenangan BPKP sebagai Pre-Audit dan BPK sebagai Post-Audit dalam Pemeriksaan Keuangan Negara; BAB V: Temuan BPK Atas Penyimpangan Keuangan Negara dalam Kasus Pelabuhan Khusus Harbour Bay Di Batam; BAB VI: Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Agung dengan Kemendagri Terkait UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; BAB VII: Hubungan PTUN dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Perkara Komjen Budi Gunawan Terkait Pengujian Kewenangan; BAB VIII: Wilayah Administrasi Rawan Korupsi; BAB IX: Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionnaire; BAB X: Penyalahgunaan Kekuasaan; BAB XI: Arah Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi di Wilayah Administrasi; BAB XII: Seminar Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Maret 2015 Pasca UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesian Private International Law - Afifah Kusumadara
2021-03-25

This book is the leading reference on Indonesian private international law in English. The chapters systematically cover the whole of Indonesian private international law including commercial matters, family law, succession, cross-border insolvency, intellectual property, competition (antitrust), and environmental disputes. The chapters do not merely cover the traditional conflict of law areas of jurisdiction, applicable law (choice of law), and enforcement. The chapters also look into conflict of law questions arising in arbitration and assess Indonesian involvement in the harmonisation of private international law globally and regionally within ASEAN. Similarly to the other volumes in the Studies in Private International Law - Asia series, this book presents the Indonesian conflict of laws through a combination of common and civil law analytical techniques and perspectives, providing readers worldwide with a more profound and comprehensive understanding of the subject.
Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual - Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 2021-12-01

Dibandingkan dengan sumber daya alam, kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan kemampuan akal pikir, manusia berupaya berdayagunakan kecerdasan intelektualnya untuk menciptakan berbagai karya hasil kreasi dan inovasi manusia, dapat berupa suatu ciptaan, produk, dan proses yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia menjalani kehidupannya. Karya-karya manusia yang dihasilkan dari daya intelektualitasnya tersebut merupakan kebendaan bergerak yang tidak berwujud (immateriil) yang dilindungi oleh hukum sebagai suatu hak kebendaan immateriil, yang lazim disebut dengan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan isu yang strategis dalam peradaban dunia dewasa ini, terutama bagi negara-negara maju yang telah banyak menghasilkan berbagai produk dan proses yang

dikembangkan secara massal. Buku ini hadir untuk mengajak pembaca mempelajari dan memahami perlindungan kekayaan intelektual melalui optik hukum. Diuraikan secara sistematis, runut, dan utuh kedelapan ranting kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Terdapat tujuh perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual yang menjadi sumber inspirasi dalam penyusunan buku ini sebagai perwujudan komitmen Indonesia menerapkan berbagai perjanjian-perjanjian internasional kekayaan intelektual. Ranting-ranting kekayaan intelektual yang uraikan dalam buku ini dikaji secara teoretis dan normatif, agar sajiannya bersifat ilmiah dan sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Melalui bukus uraian yang seperti itu, setidaknya dapat memberikan kemudahan bagi kalangan akademisi, mahasiswa, analisis hukum, praktisi dan penegak hukum serta pencipta, iventor dan desainer dalam memaknai prinsip dan norma hukum di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan aturan, prinsip dan norma hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Selain itu pembahasannya juga merujuk pada perjanjian-perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah diratifikasi maupun diadopsi oleh Indonesia dalam pembentukan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana - Shanti Dwi Kartika 2021-11-02

Puji Syukur kehadiran Allah SWT telah tersusun karya tulis ilmiah dalam buku ini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi peneliti hukum sebagai tindak lanjut dari penelitian tahun 2020 berjudul Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana. Penulis buku ini merupakan bagian Tim Penelitian tersebut yang dilakukan bersama dengan Puteri Hikmawati, S.H., M.H. dan Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Pada penelitian tersebut, penulis mempunyai fokus pada peran negara dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam perampasan aset. Fokus ini telah dikembangkan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah mengenai penanganan aset tindak pidana dalam sistem

penegakan hukum pidana. Karenanya, buku ini menjelaskan penanganan aset ditinjau dari perspektif tanggung jawab negara, dengan melihat keterhubungan antara keuangan negara, aset tindak pidana, dan penegak hukum. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini mengingat negara mempunyai tanggung jawab konstitusional sebagai konsekuensi dari berdirinya suatu negara harus memenuhi empat unsur, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari negara dari dampak tindak pidana ini. Beberapa hal tersebut menunjukkan pengembalian aset mempunyai peran penting dalam pemulihan keuangan negara dari dampak tindak pidana ini. Namun, penegakan hukum ini mempunyai kelemahan secara hukum (*de jure*), karena Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang perampasan aset/pemulihan aset, meskipun aset hasil tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada saat buku ini disusun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan telah diusulkan untuk masuk sebagai RUU Prioritas Tahun 2022. Semoga hadirnya buku ini bisa memberikan warna bagi pembangunan hukum di Indonesia, yang berkaitan dengan aset tindak pidana. Semoga buku ini juga bisa menjadi panacea bagi pembaca untuk memahami politik hukum dan pilihan kebijakan hukum sehubungan dengan aset tindak pidana.

Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa - Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H. Drs.Teddy Nurcahyawan, S.H.,M.A. Indah Siti Aprilia, S.H

Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Penulis : Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H. Drs.Teddy Nurcahyawan, S.H.,M.A. Indah Siti Aprilia, S.H Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-654-5 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Arbitrase merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa yang menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga relatif lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang

serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*), proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan untuk umum menjadikan arbitrase banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa hukum bisnis. Buku ini merupakan salah satu pengantar untuk kontribusi terhadap khasanah mengenai hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Disusun secara sistematis agar mempermudah mahasiswa memahami hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa sebagai salah satu mata ajar di Fakultas Hukum. Mengupas secara padat dan jelas mengenai asas-asas dan bentuk perjanjian, fungsi dan pengertian kontrak, perbandingan arbitrase nasional dan internasional, jenis-jenis arbitrase serta sejarah arbitrase di Indonesia. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen - David M.L. Tobing 2019-05-06

Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku karya Dr. David Tobing yang mengupas tuntas masalah klausula baku. Buku ini sangat fungsional karena amat terkait dengan perlindungan konsumen dari klausula baku yang kerap kali menjebak konsumen dalam bertransaksi, khususnya di sektor jasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap keberadaan klausula baku yang masih bertebaran di sektor industri finansial. Bravo, Pak David! —Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Buku ini memberikan pencerahan, bermanfaat luas, dan menyumbang secara nyata dalam pembangunan integritas perlindungan konsumen di Indonesia. Selamat kepada Pak David atas dedikasinya dalam perlindungan konsumen Indonesia. —Ardiansyah Parman Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN RI) Tahun 2013–2020 Buku ini merupakan wujud konkret kepekaan Penulis sebagai pengacara pembela konsumen dan kajian ilmiah Penulis terhadap pencantuman klausula baku dalam berbagai perjanjian yang melahirkan ketidakadilan bagi konsumen. Bahasan dalam buku ini akan membuka tabir tentang eksistensi klausula baku dan dampaknya sehingga akan bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha,

dan lembaga-lembaga yang terkait. —Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Mantan Hakim Agung RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Buku ini mengupas secara dalam teori, aturan hukum, dan praktik pengawasan serta penyelesaian sengketa pencantuman klausula baku di Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh setiap kalangan, tidak hanya konsumen atau akademisi, tetapi juga pelaku usaha, agar terhindar dari sengketa klausula baku. Bagi pemerintah, buku ini menjadi masukan dalam proses pengawasan dan pembangunan aturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. —Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI - Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia 2019-10-22

Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemikiran di bidang hukum dari para pakar dan praktisi hukum mengenai berbagai topik hukum yang pernah dibawakan pada seminar nasional dalam rangka hari ulang tahun IKAHI yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari pada hakim 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. IKAHI sebagai perkumpulan hakim Indonesia senantiasa berupaya mengawal dan mendukung tegaknya negara hukum dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Sejarah peradilan di Indonesia tidak bias dilepaskan dari peran serta IKAHI sebagai perkumpulan hakim untuk memperjuangkan kemandirian dan reformasi kekuasaan kehakiman. Sadar akan peran strategis, harkat dan martabat, serta besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum dan keadilan, maka Hakim Indonesia bertekad mengembangkan profesionalisme dan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam pembangunan hukum nasional termasuk diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berupa seminar nasional yang diselenggarakan pada setiap hari ulang tahun IKAHI. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan profesionalisme hakim, maka Pengurus Pusat IKAHI mengumpulkan tulisan-tulisan pemikiran di bidang hukum dari pakar dan praktisi hukum mengenai berbagai topik yang disampaikan pada seminar nasional tersebut secara digital agar lebih mudah diakses lebih meluas oleh para

hakim Indonesia guna menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum.

Aspek Hukum Informasi Indonesia - Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. 2021-06-01

Buku Aspek Hukum Informasi di Indonesia yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah referensi matakuliah aspek hukum informasi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum informasi di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai: hukum, hukum informasi, hukum internet, hukum telematika, hukum hak kekayaan intelektual, hukum hak cipta, hukum paten, hukum merek, hukum perlindungan varietas tanaman, hukum desain industri, hukum desain tata letak sirkuit terpadu, hukum rahasia dagang, dan terakhir membahas mengenai penyelesaian sengketa HKI. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah - Dr. Ade Sofyan Mulazid 2016-05-01

Tujuan buku ini tidak hanya memberikan deskripsi pada rtataran teori, tetapi menyajikan kepuasan mendalam terhadap praktik Pegadaian Syariah di Indonesia. Ada empat fokus utama sorotan buku ini. Pertama, Gadai dalam Islam. Kedua, Perkembangan Unit Pegadaian Syariah dalam PT Pegadaian (Persero). Ketiga, Peraturan Perundang-undangan Unit Pegadaian Syariah. Keempat, Politik Hukum Indonesia tentang Pegadaian Syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Perlindungan Desain Industri - DR. Ranti Fauza Mayana, S.H. 2021-03-25

Pembicaraan mengenai transformasi struktur ekonomi dunia menuju ekonomi berbasis kreativitas menempatkan ekonomi kreatif sebagai suatu konsep ekonomi baru yang mengandalkan stock of ideas, knowledge and creativity sebagai faktor produksi utama yang memberikan keunggulan kompetitif pada produk. Ekonomi Kreatif merupakan suatu sektor yang terletak pada persimpangan antara kreativitas, budaya, ekonomi dan teknologi yang diimplementasikan

kedalam bentuk usaha yang mampu menciptakan nilai dan merupakan sarana sirkulasi modal intelektual dengan potensi yang besar. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun sangat berkepentingan untuk memajukan sektor industri melalui penciptaan produk industri yang kompetitif bergantung pada rancangan pola/-model untuk penciptaan produk yang dikenal dengan istilah Desain Industri. Terkait korelasi antara kapitalisasi ide, kreativitas dan industrialisasi, keberadaan desain industri sebagai media penciptaan produk merupakan instrumen penting dalam pembentukan Industri kreatif sebagai bentuk implementasi dari konsep ekonomi kreatif tersebut.

Penelitian Hukum - Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

2022-08-09

Tanpa disadari bahwa penelitian hukum itu sebenarnya telah menjadi kegiatan rutin bagi orang-orang yang berprofesi di bidang hukum. Penelitian hukum dilakukan oleh Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Dosen Hukum, Pejabat Pemerintahan, Legislator dan lain-lain, bahkan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum. Namun demikian, masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai penelitian hukum itu sendiri. Penelitian hukum dianggap bukan penelitian karena tidak dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung. Penelitian hukum sering kali juga dianggap tidak ilmiah karena hanya menggunakan data sekunder (bahan hukum) tanpa data primer. Padahal penelitian hukum sangat khas karena hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidang hukum. Buku ini dapat menjadi titik awal untuk memahami seluk beluk penelitian hukum karena menyajikan tema secara beruntun dimulai dari pengertian penelitian hukum dan diakhiri dengan pembahasan penelitian hukum melalui internet. Dengan membaca buku ini dapat dihindari kesalahpahaman mengenai penelitian hukum itu sendiri.

Hukum Lingkungan di antara Para Pemalas - Suparto Wijoyo 2020-01-07
hukum lingkungan telah dikonsepsikan ada dalam lingkup pembangunan berkelanjutan yang bersendikan rangkaian keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara integral. Perubahan ekologis sangat berpengaruh pada terjadinya Perubahan Perilaku di

kehidupan umat manusia. Apalagi rusaknya ekologis sangat cepat membantu terjadinya kerusakan pada kehidupan umat manusia. Buku ini meliputi 8 pokok permasalahan. Bab 1 sampai 3 membahas masalah lingkungan dan pengelolaannya. Bab 4 sampai 7 membahas budaya masyarakat terhadap lingkungan. Dan bab 8 mengenai bencana banjir dan lumpur.

Hukum Tata Negara Indonesia - Fajlurrahman Jurdi 2019-04-10

Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Hukum Persaingan Usaha - Dr. Cita Citrawinda, S.H, M.I.P 2021-03-16

Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang memuat bahasan mengenai hokum persaingan usaha secara keseluruhan sehingga bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hukum Persaingan Usaha mulai dari sejarah dan perkembangannya, dasar hukum, tujuan dibentuknya, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta perbandingan penyelesaian sengketa persaingan usaha di beberapa negara.

Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual -

Dr. Yahman, S.H., M.H 2021-05-03

Buku ini membahas secara lugas dan mudah tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Wanprestasi dan Penipuan yang diawali dengan suatu perjanjian/kontraktual. Buku ini sangat bermanfaat bagi Akademisi maupun para penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat), sehingga dapat memiliki pemahaman yang sama dalam konteks suatu perjanjian/kontraktual, dapat pula dimengerti tentang batas pembeda Wanprestasi dan Penipuan. Dua persoalan ini memang memiliki suatu ciri/karakteristik yang sama, dan tidak mudah untuk membedakan suatu perjanjian/ kontraktual yang sudah ditanda tangani

Ilmu Perundang-undangan 2 - Maria Farida Indrati Soepratto

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan tersebut secara lebih baik.

Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia - Laurensius Arliman Simbolon 2019-05-22

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara. Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam lingkup nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

MENGENAL LEBIH JAUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.I.P

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk berbagi pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan hak kekayaan intelektual, khususnya berdasarkan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang memuat bahasan mengenai hak kekayaan intelektual secara keseluruhan sehingga bisa menjadi pencerahan bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hak Kekayaan Intelektual mulai dari sejarah dan perkembangannya, ruang lingkup, jangka waktu perlindungan hingga sanksi pelanggarannya. Buku ini

menguraikan secara komprehensif mengenai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan TRIPs yang terkait dengan aspek ekonomi di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting - Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu mempergunakan pendekatan teori positivisme hukum dan realisme hukum yang dalam implementasinya lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca: undang-undang) dan kelompok mayoritas yang sering disebut mewakili kata "sosial". Positivisme hukum yang memunculkan aliran normatif yuridis dipergunakan untuk penyusunan dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan atau dasar yuridis yang jelas dan pasti. Sementara itu, sosiologis empiris dipergunakan untuk merekonstruksi gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum yang kemudian dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan dengan harapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Berpijak dari pemahaman di atas buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini tidak sekadar menggunakan pendekatan rule of law melalui pendekatan positivistik yang mengedepankan kepentingan penguasa dan kepentingan mayoritas dalam perspektif multimakna, tetapi juga menggunakan pendekatan rule of ethics.

Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia - Tim Lindsey
2016-07-28

Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia investigates criminal law and practice relevant to drugs regulation in three Southeast Asian jurisdictions: Indonesia, Singapore and Vietnam. These jurisdictions represent a spectrum of approaches to drug regulation in Southeast Asia, highlighting differences in practice between civil and common law countries, and between liberal and authoritarian states. This book offers the first major English language empirical investigation and comparative analysis of regulation, jurisprudence, court procedure, and practices

relating to drugs law enforcement in these three states.

Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana - Ade Adhari

2020-03-01

Penulisan buku ini dilatarbelakangi beberapa alasan: pertama, pembaharuan hukum pidana, baik dalam bidang substansi hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan pidana merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh hukum pidana. Dikatakan sebagai masalah besar, karena permasalahan pembaharuan bersifat lintas generasi. Pembaharuan hukum pidana akan dihadapi oleh suatu bangsa tanpa melihat konteks waktu dari suatu generasi—sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi sekarang, melainkan juga generasi di masa datang. Hakikatnya pembaharuan dalam bidang atau bentuk apapun seyogyanya bersifat berkelanjutan (sustainable). Sehingga wajar apabila Jerome Hall menyatakan improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise. Usaha memperbaharui hukum pidana menjadi kegiatan teoritis dan praktis yang lintas generasi, terus menerus dan tiada henti. Pandangan ini didasarkan karena hukum (pidana) sebagai pranata yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga akan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya. Untuk itu, kebijakan untuk memperbaharui hukum pidana juga harus selalu diupayakan. Kedua, meminjam dalil yang disampaikan Marc Galanter, justice in many rooms. Sebaliknya ketidakadilan juga dapat ditemukan dimanapun (injustice in many rooms). Ketidakadilan ternyata tidak hanya dapat ditemukan dalam ranah praktik penegakan hukum, melainkan pula dalam ruang-ruang akademik. Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

ICOLEG 2021 - Irma Cahyaningtyas 2021-10-12

We proudly present the proceedings of 2nd International Conference on Law, Economic and Governance 2021 (ICOLEG 2021). It focuses on how the wave of digitalization influences the ethics and law, especially in Law and Democracy, Law and Indigenous People, Law in Contemporary Issues, Law and Economics, Digital Economics, Good Governance etc. As we know, the world today is changing and the world we are facing now is

the one where everything is connected. The contemporary social issues based on complex problems, complex interest, beyond borders and powers. More than 125 manuscripts from various countries were presented at this conference with around 66 of them selected to be published in proceedings. We hope by this conference, discussions on how research on Law, Economic and Government is possible in a disruptive era will give a perspective for the social and humanities studies development.

Naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan kerja di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). - 1996
Dismissal of employees by government-owned corporations, Indonesia; academic draft of a bill.

Perda Berbasis Agama - Sirajuddin 2021-02-14

Resepsi norma agama ke dalam Perda dapat dilakukan, dan resepsi tersebut hanya diperlukan dalam pembentukan Perda yang berlaku untuk umum. Di sisi lain norma agama yang bersifat eksklusif juga dapat diadopsi, namun pemberlakuannya hanya ditujukan secara eksklusif kepada orang-orang pemeluk agama yang bersangkutan, dan tidak menutup kemungkinan diikuti atau ditaati pula oleh orang-orang lain. Dengan demikian, karakteristik inklusifitas norma agama selain ditentukan oleh persesuaiannya dengan realitas kemasyarakatan, juga sangat ditentukan oleh aspek kemanfaatan hukumnya (doel matigheids). Walaupun norma agama yang akan diresepsi ke dalam Raperda tersebut telah melalui identifikasi dan dituangkan dalam naskah akademik, namun materi Raperda tersebut tetap harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stake holder lainnya. Sosialisasi merupakan instrumen uji publik yang bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi Pemerintah Daerah terhadap suatu norma sama dengan persepsi masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir pertentangan atau protes yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Buku ini sangat layak dan penting untuk dibaca bagi akademisi, mahasiswa dan praktisi hukum, khususnya yang bergelut dalam perancangan peraturan perundang-undangan.

Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang

Penegakan Hukum - Arief Budiono, S.H., M.H., dkk

Buku ini berisi tentang berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, yang seharusnya penegakkannya dilandasi dengan nilai-nilai keadilan maupun keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena hukum hadir untuk menjamin keadilan setiap warga negara Indonesia. Tujuan tim penulis membuat buku ini, selain untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta juga sebagai kontribusi penulis untuk pembangunan (penegakan) hukum di Indonesia.

Strangers Next Door? - Tim Lindsey 2018-02-22

There are no two neighbouring countries anywhere in the world that are more different than Indonesia and Australia. They differ hugely in religion, language, culture, history, geography, race, economics, worldview and population (Indonesia, 270 million, Australia less than 10 per cent of that). In fact, Indonesia and Australia have almost nothing in common other than the accident of geographic proximity. This makes their relationship turbulent, volatile and often unpredictable. *Strangers Next Door?* brings together insiders and leading observers to critically assess the state of Australia-Indonesia relations and their future prospects, offering insights into why the relationship is so important for Australia, why it is so often in crisis, and what this means for the future. This book will be of interest to anyone concerned with the Indo-Pacific region, Southeast Asia, Australia and Indonesia, and each country's politics, economy and foreign policy. It contains chapters that will interest specialists but are written in a style accessible to a general audience. The book spans a diverse range of subjects, including political relations and diplomacy, security and defence, the economy and trade, Islam, education, development, the arts, legal cooperation, the media, women, and community ties. Contributors assess the current state of relations in their sphere of expertise, and outline the factors and policies that could shape bilateral ties - and Indonesia's future - over the coming decades. University of Melbourne scholars Tim Lindsey and Dave McRae, both prominent observers and commentators on Indonesia and its relations with Australia, edited the volume, providing a synthesising

overview as well as their own thematic chapters.

Kusebut Indonesia - Suparto Wijoyo 2012-01-01

INDONESIA. Inilah negara dengan semua berkah Tuhan tercurah yang melebihi dari yang diberikan di belahan Bumi manapun dalam konstalasi kosmos semesta. Bumi dan langitnya berada dalam titik koordinat yang pas seimbang ini adalah kreasi agung Tuhan yang mengagumkan. Pohon-pohon dan rerumputannya serta hewan-hewannya yang melatah dan bercingkrak riang dengan beragam jenis serta kompleksitas aromanya, tanpa bisa dicatat sempurna dalam lembaran buku yang terpajang di perpustakaan pendidikan selengkap apapun, kecuali Pustaka Tuhan. Indonesia memberi pesan teologis seolah-olah dunia ini tercipta dalam replika yang ada di bentara Nusantara. Apa yang ada di jaringan semua galaksi dan sistem tata surya terhentak dan terwakili dalam lubang kehidupan yang ada di Indonesia. Semua suku bangsa yang menghuninya merefleksikan tatanan peradaban dunia yang memiliki kosakata paling representatif dengan derajat yang tinggi. Hamparan tanah dengan sumber daya hayatinya (biodiversity) memberi pesan dan menjalankan tikar yang menyelimuti indahnya ciptaan Gusti Allah. Air yang berkecukupan dengan rotasi hidrologi yang unik dan udara yang menyegarkan dalam hantaran angin yang bergerak bergelombang, adalah pertanda bahwa Indonesia memiliki apa yang dibutuhkan manusia secara total. Ya alam Indonesia menyediakan apa yang dibutuhkan manusia secara paripurna dan bukan yang diinginkan manusia penuh serakah. Maka Indonesia diniscayakan dapat memenuhi semua jenis dan keragaman kebutuhan manusia dalam jaringan keseimbangan dunia yang berelasi secara presisif sesuai dengan kaedah Illahiyah. Amin.

Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan - Willy Farianto 2021-03-31

Fenomena digital marketplace dan sharing economy saat ini semakin dominan. Pengusaha transportasi hanya memberikan gagasannya, membuat aplikasi dan mengundang orang untuk bergabung melalui aplikasinya. Ia tidak perlu membeli kendaraan, membuat pool dan mengangkat para sopir. Pertanyaannya, bagaimana status hubungan hukumnya, apakah merupakan hubungan kerja atau hubungan hokum

lainnya dan bagaimana perlindungan hak-hak normatifnya. Karena untuk mendapatkan perlindungan hukum dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang belum semuanya terjangkau. Buku ini sangat penting untuk dibaca di mana penulis mengidentifikasi beberapa pola hubungan yang muncul karena fenomena tersebut serta membuat analisis unsur perjanjian kerja terhadap pola hubungan hukum yang dibangun antara pemberi kerja dengan pekerja. Beberapa pola hubungan hukum antara pemberi kerja dengan pekerja yang dibahas dalam buku ini adalah: (1) Pola hubungan keagenan, misalnya agen asuransi; (2) Pola hubungan kemitraan, misalnya sopir taksi konvensional; (3) Pola hubungan kemitraan online, misalnya taksi online; (4) Pola hubungan kemitraan atas dasar sewa-menyewa, pinjam bendera dan kepemilikan; (5) Pola hubungan kemitraan atas dasar bagi hasil; dan (6) Pola hubungan berdasarkan perjanjian lisan. Juga dikaji perbandingan hukum sejenis di negara lain. Pembahasan buku ini layak diberikan apresiasi karena selain menguraikan permasalahan hubungan hukum juga menawarkan suatu solusi yang dapat menjadi pertimbangan dan referensi

Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas - Andhika Prayoga, S.H., M.Si.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mengalami siklus kehidupan dan kematian sebagaimana manusia. Kehidupan PT diawali dengan pemberian status badan hukum oleh negara, maka kematian PT sebaliknya ditandai dengan dicabutnya status tersebut yang juga dilakukan negara. Proses pengakhiran eksistensi Perseroan Terbatas diawali dengan pembubaran, yang diikuti dengan likuidasi berupa pembebasan harta kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban pada Kreditor. Setelah likuidasi selesai, maka PT akan memasuki tahap pengakhiran status badan hukum, yang merupakan fase terakhir dari pengakhiran Perseroan Terbatas. Buku ini menyajikan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pembubaran, proses pelaksanaan likuidasi serta proses administrasi dalam pengakhiran status badan hukum, serta hak dan kewajiban dari Likuidator sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan likuidasi, berdasarkan UU Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait. Buku ini merupakan pengantar dasar untuk memahami konsep pembubaran, likuidasi dan pengakhiran status badan hukum PT secara utuh, yang disertai dengan kritik untuk perbaikan rumusan dan implementasi norma dalam pembentukan peraturan mendatang. Dalam buku ini, penulis mencoba menguraikan peraturan-peraturan yang sifatnya normatif disertai kritik dan argumentasi atas kebuntuan normatif yang tidak terselesaikan melalui teks hukum saja. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi praktisi di bidang perbankan, asuransi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau bagi para pemangku kepentingan di bidang pengurusan perseroan terbatas. serta menjadi pencerahan bagi para akademisi dan mahasiswa baik pada fakultas hukum, dan pelaku profesional seperti advokat dan likuidator di Indonesia.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik : Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber - Dr.

Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M. 2021-11-29

Buku ini merupakan hasil karya tulis disertai penulis dengan judul: Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber. Dalam buku ini penulis menggam-barkan berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi di dunia maya atau dunia siber dan sekaligus memberikan solusi bagaimana sebaiknya memberikan perlindungan konsumen dalam transaksi perniagaan elektronik. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para penegak hukum, pemerhati hukum, para konsumen dan mahasiswa.

Hukum Kontrak Migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu) - M. Luthfan Hadi Darus Bin Irfan Darus 2022-11-04

Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa, dosen dan juga praktisi yang konsen dibidang kontak minyak dan gas bumi untuk membantu mempelajari konsep-konsep dan praktik kontrak minyak dan gas bumi berdasarkan jenis dan ruang berlakunya di Indonesia.

Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters - Anselmo Reyes 2019-09-19

This collection offers a study of the regimes for the recognition and enforcement of foreign commercial judgments in 15 Asian jurisdictions: mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka and India. For practising lawyers, the book is intended as a practical guide to current law and procedures for enforcing judgments in the selected jurisdictions. However, it does not stop at describing current law and practice. Of interest to academics and students, it also analyses the common principles of the enforcement regimes across the jurisdictions, and identifies what should be regarded as the norm for enforcement in Asian countries for the purpose of attracting foreign direct investment and catalysing rapid economic development. In light of the common principles identified, the book explores how laws in Asia

may generally be improved to enable judgments to be more readily enforced, while ensuring that legitimate concerns over indirect jurisdiction, due process and domestic public policy are respected and addressed. With this in mind, the book discusses the potential impact that the adoption of the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements might have on Asian jurisdictions; it also considers the potential impact of the convention for the enforcement of judgments in civil and commercial matters presently being drafted by the Hague Conference on Private International Law. This timely book argues that it is imperative to adopt a uniform system for the recognition and enforcement of judgments throughout Asia if there is to be traction for the enhanced cross-border commerce that is expected to result from endeavours such as the ASEAN Economic Community (AEC), the Belt and Road Initiative (BRI), CPTPP (also known as TPP-11), and RCEP.